

PENGARUH PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Andi Syunandar B¹, Andi Mattulada Amir, Vita Yanti Fattah²

andisyunandar@yahoo.com

¹*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

²*Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

Abstract

Purpose of this study are : 1) to determine and analyze simultaneous influence of rural-urban property taxes and land acquisition fees to capital expenditure in district/ towns in Central Sulawesi Province; 2) to determine and analyze partial influence of rural-urban property taxes on capital expenditure in district/ towns in Central Sulawesi Province; 3) to determine and analyze partial influence of land acquisition fees on capital expenditure in district/ towns in Central Sulawesi Province. The study applies verificative approach and select 11 district/ towns in Central Sulawesi Province as samples. Methods of data collection applied are: interviews, observations, and documents. Data is analyzed with multiple linear regressions. The results show that: 1) rural-urban property taxes and land acquisition fees have simultaneous influences on capital expenditures in district/ towns in Central Sulawesi Provinces; 2) rural-urban property taxes partially have significant on capital expenditures in district/ town in Central Sulawesi Province; 3) land acquisition fees partially have significant influence on capital expenditures in district/ towns in Central Sulawesi Province.

Keywords: *rural urban property taxes, land acquisitions fees, and capital expenditures.*

Desentralisasi adalah cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi pengambilan keputusan dan kontrol. Kebijakan desentralisasi fiskal dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. *Desentralisasi fiskal* ini menyangkut kewenangan menggali sumber – sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi (Litvack, 1999). yang direvisi dengan UU No. 33 tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB). Adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan kebijakan yang baru pemerintah daerah memperoleh pendapatan tambahan. Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah (Kurniawati, 2014).

Pada umumnya sumber dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasional daerah dan sisanya dialokasikan untuk belanja daerah lainnya diantaranya Belanja Modal. Namun Bank Indonesia dalam *Bisnis.com* (11/08/2016) mencatat bahwa alokasi Belanja Modal di hampir seluruh daerah terhadap total anggaran secara umum masih rendah. Mayoritas dana transfer yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah digunakan untuk mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun 2013 rata – rata belanja pegawai untuk pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar 49%. Belanja Modalnya hanya 25,3% (Data *Institute for Development of economic an Finance (Idef)*, 2012). Fenomena dalam penelitian ini, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri pada tahun 2012 - 2015 jumlah persentase pengalokasian Belanja Modal dari total APBD yang dimiliki oleh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah rata – rata sebesar 24.3 %. Ini berarti bahwa dari pengalokasian Belanja Modal untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah belum sesuai dengan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 yaitu sebesar 29 % dari total APBD.

Fenomena utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan PBB-P2 dan BPHTB sebagai sumber pembiayaan yang digunakan untuk Belanja Daerah terutama Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah.

Mengacu pada latar belakang di atas, dengan melihat betapa pentingnya variabel yang meningkatkan sumber – sumber pembiayaan daerah seperti PBB-P2 dan BPHTB dalam investasi daerah seperti belanja modal maka permasalahan penelitian ini adalah apakah “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan – Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh terhadap

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB serta pertumbuhan Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Apakah PBB-P2 dan BPHTB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Apakah PBB-P2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Apakah BPHTB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB serta pertumbuhan Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PBB-P2 dan BPHTB terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PBB-P2 terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.;4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh BPHTB terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah,

METODE

Penelitian *verifikatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga di peroleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian

sebelumnya. Untuk mengetahui pengaruh variabel dependan terhadap variable independen. Dengan model regresi berganda dengan menitikberatkan pada penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sebagai variabel bebas dan Belanja modal sebagai variabel tetap.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012-2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi (pengumpulan data berdasarkan dokumen dan laporan tertulis) dan wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisi regresi liner berganda. Dengan menggunakan data sekunder yang yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah. Data yang lain di peroleh adalah laporan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Software* yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah program SPSS *Statistics* 16.0. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan dimensi waktu selama 4 (empat) tahun.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yang menurut Sugiyono (2012:85) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dari 13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penelitian ini hanya mengambil sampel 11 Kabupaten/ Kota dengan

pertimbangan 2 kabupaten yang belum menyerahkan laporan pajaknya dikarenakan dengan alasan berdirinya kabupaten tersebut diatas tahun 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan – Perkotaan (PBB-P2).

Pertumbuhan PBB-P2 pada rentang tahun 2012 - 2015 mencapai Rp. 10.448.492.511 pertahun. Dengan jumlah pertumbuhan PBB-P2 terjadi pada tahun 2012 sebelum pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yakni sebesar Rp. 18.334.634.522. PBB-P2 di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah rata – rata pada tahun 2012 – 2014 menurun -48,0% dan mulai meningkat pada tahun 2015 sebesar 16,5%. Dari 11 Kabupaten/ Kota pada tahun 2015 hanya Kota Palu yang memiliki nilai pertumbuhan PBB-P2 sebesar 38%. Hal ini disebabkan karena Kota Palu sudah melakukan peralihan pada tahun 2010 Sedangkan kabupaten lain yang memiliki penurunan pertumbuhan PBB-P2 terendah adalah Kabupaten Morowali, dengan nilai penurunan yang signifikan rata-rata sebesar -34% pertahun dan mulai meningkat pada tahun 2014-2015 sebesar 0,4%, secara keseluruhan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah pada saat peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -12% yang berarti mengalami penurunan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rata-rata BPHTB daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah adalah Rp. 1.530.359.645 tiap tahunnya dalam kurun waktu 2012 - 2015. Dengan realisasi secara keseluruhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.783.922.571. dengan nilai rata-rata tertinggi selama rentang waktu 2012 – 2015 adalah Kota Palu sebesar

Rp. 9.746.792.950. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terjadi peningkatan BPHTB secara keseluruhan pada kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, dimana pertahunnya rata - rata sebesar 29,1 %. Pertumbuhan BPHTB dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten Donggala sebesar 166 % pertahun rentang waktu 2012 –2015 dan Persentase terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengalami penurunan sebesar -69 % pertahun selama 4 (empat) tahun. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan BPHTB di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Belanja Modal

Pada tahun 2012 rata – rata jumlah belanja modal seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 1.587.101.497.644 bertambah menjadi Rp.2.471.357.695.442 pada tahun 2015. Dengan rata – rata peningkatan nilai alokasi belanja modal pertahunnya sebesar Rp. 182.887.442.245 dan nilai rata – rata keseluruhan belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 224.668.881.401. rata – rata peningkatan alokasi belanja modal pertahunnya sebesar 20,5% atau sebesar Rp. 182.887.442.245 pertahun. Dengan nilai rata – rata persentase tertinggi adalah Kota Palu sebesar 35% dan Kabupaten Morowali sebesar 29% dan terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 7%. Pertahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pertumbuhan belanja modal Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengalokasian belanja modal belum mencapai standar amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 yaitu sebesar 29-30%, dari 11 kabupaten/ kota yang di teliti, hanya 2 (dua) Kabupaten/ Kota yang mencapai standar tersebut yakni Kota Palu dan Kabupaten

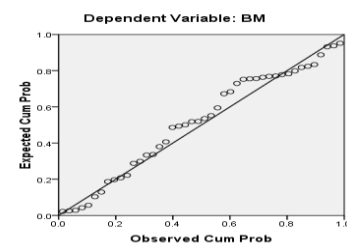
Morowali. Seharusnya alokasi belanja modal Daerah Kab/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah mendekati angka 30% mengingat bahwa Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah yang sedang berkembang.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Gambar uji normalitas yang dilakukan pada program SPSS sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar di atas, grafik normal probability plot terlihat titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dideteksi dengan menggunakan *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance value* diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas nilai tolerance variabel PBB-P2 adalah 0,885 dan BPHTB 0,885 atau dengan kata lain nilai *tolerance* semua variabel independen > 0,1 dan nilai *VIF* PBB-P2 1,130 dan BPHTB 1.0130 atau nilai *VIF* semua variabel independen < 10, dengan demikian dapat

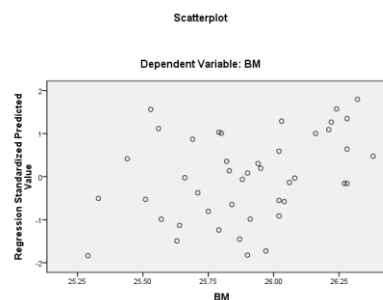
disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi menguji apakah dalam model sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya, jika terjadi korelasi maka dinamakan ada autokorelasi, model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006). Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,897, selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan signifikansi 5 %, dengan jumlah sampel $N = 44$ dan jumlah variabel independen 2 ($K=2$) = 1,897 Berdasarkan pada tabel Durbin Watson, maka diperoleh nilai $dU = 1,6120$ sehingga nilai DW 1.897 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,6061 dan kurang dari $(4 - dU)$ atau $4 - 1,6120 = 2,388$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. kriteria ini sebagaimana dikatakan oleh Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka hipotesis nol ditolak atau terdapat autokorelasi; b) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima atau tidak terdapat autokorelasi; c) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*, sebagai berikut.



Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu y dan terlihat tidak ada pola yang jelas yang terbentuk dari titik-titik tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependendalam hal ini PBB-P2 dan BPHTB terhadap Belanja Modal Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan data yang sudah di logaritma (Ln) kemudian diuji secara statistik. Pengolahan data penelitian ini menggunakan *software SPSS 16* dengan hasil sebagai berikut:

Variabel Regresi	Beta	t hitung	Sig
Constanta	25.854	36.736	0,000
PBB-P2 (X_1)	-0,052	-0,678	0,101
BPHTB(X_2)	0,061	2,444	0,019
R	:0,377	F hitung	3,393
Multiple R	:0,142	Sig F	:0,045
Adjusted R Square	:0,100	α	:0,05
Predictors: (Constant), PBBP2 X1, BPHTB X2			
Dependent Variable: BM Y			

Model Regresi yang diperoleh dari tabel di atas adalah sebagai berikut: $Y = 25.854 - 0,052 + 0,061$

Model persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 25.854 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (PBB-P2 dan BPHTB) maka besaran belanja modal adalah 25.854

2. Koefisien regresi PBB-P2 adalah -0,052 menunjukkan bahwa jika PBB-P2 bertambah 1 dengan variabel lain bernilai 0, maka Belanja Modal akan berkurang menjadi 25,853
3. Koefisien regresi BPHTB adalah 0,061 menunjukkan bahwa apabila BPHTB bertambah 1 maka nilai Belanja modal akan meningkat menjadi 25.854,061.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak terbukti. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai α (α) = 0,05. Hasil perhitungan regresi berganda diperoleh nilai F_{hitung} 3,393 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.043. Tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0.05 berarti bahwa variabel PBB-P2 dan BPHTB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Nilai R^2 adalah 0,100. Hal ini berarti hubungan antara belanja modal dengan variabel PBB-P2 dan BPHTB sebesar 10 % yang berarti lemah. Angka 10 % dapat diartikan bahwa belanja modal dapat dijelaskan oleh PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sedangkan selebihnya 90 %, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Koefisien korelasi R memberikan makna tingkat keeratan variabel independen dengan variabel dependen, semakin tinggi nilai koefisien maka hubungan antar variasi semakin erat, hasil analisis di atas menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi R adalah sebesar 0,377 (37,7 %). Hal ini berarti tingkat keeratan hubungan variabel tersebut adalah korelasi cukup berada pada 0,25-0,50 (Sugiyono. 2008).

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel dependen secara parsial terhadap variabel independen. Uji hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh PBB-P2 terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel koefisien diperoleh nilai t_{hitung} PBB-P2 sebesar -1,678 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 1,68195 dan nilai sig. Sebesar 0,101 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel PBB-P2 secara parsial pengaruh tidak signifikan dan berlawanan arah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah. PBB-P2 yang kecil tentu belum mampu menutupi belanja modal yang jumlahnya besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena adanya keengganan masyarakat membayar PBB-P2 disebabkan masyarakat tidak merasakan langsung dampak bagi daerah mereka sendiri.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Uji hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui pengaruh BPHTB terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t_{hitung} BPHTB sebesar 2,444 lebih dari nilai t_{tabel} 1,68195 dan nilai sig. Sebesar 0,019 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel BPHTB secara parsial berpengaruh signifikan dan searah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Peralihan BPHTB menjadi pajak daerah jumlah nilai rata-rata pertumbuhan BPHTB kabupaten/ kota mencapai 29,1 % pertahun sehingga secara tidak langsung memberikan tambahan terhadap PAD daerah dalam pendistribusian belanja modal Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imas (2015) bahwa BPHTB berpengaruh terhadap PAD dan memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap alokasi belanja modal daerah baik itu sebelum dan sesudah desentralisasi. Namun

hal ini berbeda terhadap daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki pendapatan pajak BPHTB yang relatif kecil dan pertumbuhannya menurun tiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Perkembangan PBB-P2 dan BPHTB serta Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun.
2. Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Rekomendasi

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap belanja modal, sehingga tidak tampak variabel lain yang berpengaruh secara keseluruhan terhadap belanja modal. Penelitian berikutnya memasukkan variabel lain dari pajak selain PBB-P2 dan BPHTB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.
2. Analisis yang dilakukan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan secara komperhensif, sehingga belum dapat diketahui kemampuan masing-

masing pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, kapasitas dan kebutuhan fiskalnya.

3. Keterbatasan waktu dan data, maka variabel PBB-P2 dan BPHTB diteliti pengaruhnya terhadap Belanja Modal tanpa melihat pengaruh dari peralihan pajak (sebelum dan sesudah).
4. Periode tahun penelitian ini hanya dilakukan pada rentang tahun 2012 sampai 2015.
5. Jumlah Kabupaten/ Kota yang diteliti hanya 11 yang seharusnya 13 Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan, saran dan tanggapan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si., sebagai Pembimbing Ketua dan Dr. Vita Yanti Fattah, S.E., M.Si., sebagai Pembimbing Anggota yang selalu sabar dan tekun membimbing, memberikan perhatian dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Data *Institute for Development of economic an Finance (Idef) 2012*
- Ghozali Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Undip
- Kurniawati Fitri. 01 Maret 2014 Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*. Vol 22
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 2012. *Laporan Keuangan Pemerintah*

- Daerah Prov Sulawesi Tengah T.A 2012
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Prov Sulawesi Tengah T.A 2013
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Prov Sulawesi Tengah T.A 2014
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Prov Sulawesi Tengah T.A 2015
- Litvack & Seddon.1999. Decentralization Briefing Noefing Notes. World Bank Institute
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Republik Indonesia.2009.*Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Achmad Unazir Zikri, 2016. Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi (StudiEmpiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi dan Bisnis* Volume. 1, No.1